

Kehidupan Masyarakat Bima Pada Masa Kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin Tahun 1915-1951

M Al Qautsar Pratama

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: alqautpr@yahoo.com

Abstract

This study aims to reveal the role of Sultan Muhammad Salahuddin in the development of Islam in the Bima area. The problem examined in this paper is focused on how the condition of Bima pre Sultan Muhammad Salahuddin, How Sultan Muhammad Salahuddin's efforts in developing Islam in Bima and How the challenges and opportunities faced by Sultan Muhammad Salahuddin in developing Islam in Bima. The researcher uses historical methods, to reveal historical facts about the biography of Sultan Muhammad Salahuddin and its role in the development of Islam in the Bima area. To analyze this fact, researchers used an approach that is often used in historical research, namely political, sociological, anthropological, religious and educational approaches. This research found that Muhammad Salahuddin was born in a palace environment and was raised by scholars. It was from the training of these ulemas that they formed the sultan's personality until he grew up. Muhammad Salahuddin was crowned Sultan after the death of his brother Abdul Azis and learned from ulemas in the region and outside his region that during his leadership, Islam in Bima underwent development, in developing Islam in the Bima area, Sultan renewed so that during his time Islam in Bima was experiencing glory. The things that are done by the Sultan are building educational institutions both formal and non-formal, and mosques and in supporting the progress of the Bima Sultan to finance and provide scholarships to adolescents who study in the Middle East and for those who have abilities in the fields religion.

Keywords: Bima people, leaders, Sultan Muhammad Salahuddin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tentang peranan Sultan Muhammad Salahuddin dalam perkembangan Islam di daerah Bima. Masalah yang diteliti dalam tulisan ini difokuskan pada Bagaimana kondisi Bima pra Sultan Muhammad Salahuddin, Bagaimana Usaha-usaha Sultan Muhammad Salahuddin dalam mengembangkan Islam di Bima dan Bagaimana tantangan dan peluang yang dihadapi Sultan Muhammad Salahuddin dalam mengembangkan Islam di Bima. peneliti menggunakan metode sejarah, untuk mengungkapkan fakta sejarah tentang biografi Sultan Muhammad Salahuddin dan peranannya dalam perkembangan Islam di daerah Bima. Untuk menganalisis fakta tersebut peneliti menggunakan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian sejarah, yaitu pendekatan politik, sosiologi, antropologi, agama dan pendidikan. Penelitian ini menemukan Muhammad Salahuddin lahir dalam lingkungan istana dan dibesarkan oleh para ulama. Dari didikan ulama inilah sehingga membentuk kepribadian sultan sampai tumbuh dewasa. Muhammad Salahuddin di nobatkan menjadi Sultan setelah kematian saudaranya Abdul Azis dan mendapatkan pelajaran dari ulama di daerah dan luar daerahnya sehingga pada masa kepemimpinannya Islam di Bima mengalami perkembangan, dalam mengembangkan Islam di daerah Bima Sultan melakukan pembaharuan sehingga pada masanya Islam di daerah Bima mengalami kejayaan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Sultan adalah membangun lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal, dan masjid-masjid dan dalam menunjang kemajuan daerah Bima Sultan membiayai dan memberikan beasiswa kepada remaja yang sekolah di timur tengah dan bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang agama.

Kata Kunci: Masyarakat Bima; Pemimpin; Sultan Muhammad Salahuddin.

PENDAHULUAN

Kesultanan Bima merupakan salah satu wilayah yang memiliki peranan penting dalam panggung sejarah Islam khususnya di kawasan Nusa Tenggara. Jauh sebelum terjadinya proses pengislaman, Bima sudah menjadi daerah dengan perkembangan perdagangan yang cukup pesat. Menurut catatan Bo Sangaji Kai (Rahman Hamid, 2014), cikal bakal daerah Bima dirintis oleh pendatang dari Jawa yang bernama Sang Bima yang kemudian menikah dengan Putri Tasi Sari Naga. Dari pernikahan tersebut melahirkan dua orang putra yang bernama Indra Zamrud dan Indra Komala, kedua anaknya tersebutlah yang menjadi cikal bakal keturunan raja-raja Bima (Gani Abdullah, 2005). Dalam catatan lainnya disebutkan bahwa Ncuhi Dara dan Padolo menyampaikan keputusan pada saat Sang Bima memahat Wadu Pa'a mungkin dilakukan oleh Sang Bima yang beragama Hindu Siwaistik atau orang-orang Hindu yang hilir mudik melewati Flores kala itu. Kuat dugaan dia sedang memimpin ekspedisi yang singgah di Pulau Satonda kemudian tiba di teluk Bima. Bisa dikatakan bahwa sang Bima merupakan orang yang memiliki andil penting dalam pendirian kerajaan Bima Hindu namun raja pertama yang memimpin kerajaan Bima yakni putranya Indra Zamrud yang diasuh oleh Ncuhi Dara.

Menurut Morris kedatangan Sang Bima ke tanah *Mbojo*, berhasil mengubah pola kehidupan terutama pada bidang pertanian dan peternakan pada masyarakat Bima bahkan Sang Bima juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat. Hal tersebut merupakan pertimbangan bagi masyarakat setempat untuk memberikan penghormatan sehingga Sang Bima diangkat sebagai pemimpin dan sebagai penghargaan lain maka nama Sang Bima disepakati sebagai nama Bima yang sebelumnya bernama *Mbojo*. Pada masa sebelum masuknya Islam Bima terbagi menjadi beberapa wilayah. Tiap wilayah dikuasai oleh kelompok masyarakat yang dikepalai oleh seorang "*Ncuhi*".

Zaman "*Ncuhi*" dipandang oleh orang Bima sebagai permulaan bagi rentetan kehidupan dan oleh karena itu zaman "*Ncuhi*". Disebut juga zaman "*zaman ncuhi ro naka*". Masa *Ncuhi* merupakan ambang sejarah (Proto Sejarah) pada masa ini masyarakat mulai hidup berkelompok, menetap, mengenal pertanian dan peternakan dan masyarakat hidup teratur dibawah pimpinan seorang *Ncuhi* Menurut tuturan orang Bima yang dimaksud dengan "*Ncuhi*" adalah "*edere domo dou, ina mpuu naba weki marimpa di siri wea nggawo na, di batu wea lele na*". Pengertian "*Ncuhi*". Berdasarkan tuturan tersebut adalah *Ncuhi* adalah orang yang menjadi sumber kelahiran bagi turunan secara terus-menerus dan merupakan manusia pertama yang menjadi cikal bakal kelompok masyarakat yang bertanggung jawab untuk memberi perlindungan bagi seluruh masyarakat dan dijadikan sebagai sumber hukum yang wajib ditaati (Gani Abdullah, 2015).

Dalam naskah Bo ditemukan bahwa masyarakat pada masa itu sudah mengenal jenis tombak, parang, bercocok tanam, di daerah pengunungan dan berternak dan mereka belum mengenal sistem pengolahan tanah persawahan serta bajak-membajak. Kehidupan masyarakat zaman *Ncuhi* mengalami perubahan setelah datangnya imigran Jawa yang tidak ditemui sumber kuat kapan orang Jawa datang ke tanah Bima namun dalam buku Sejarah Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud orang Jawa datang ke tanah Bima sekitar tahun 1575. Perkiraan tersebut belum bisa dijadikan sebagai acuan dikarenakan ekspansi perluasan wilayah Majapahit ke arah Timur dilakukan antara lain menaklukan Bima pada tahun 1357. Data itu menunjukkan bahwa sebelum tahun 1357 diperkirakan telah datang imigran di Bima. Dalam naskah Bo hanya di jumpai bahwa kedatangan Imigran Jawa saat sebelum pergantian nama "*Mbojo*" menjadi Bima tanpa menyebutkan angka tahunnya. Pada awal XVII Kerajaan Bima mengalami kemelut politik yang berkepanjangan, terjadi intrik politik yakni perebutan kekuasaan dengan serangkaian pembunuhan dan intrik (Malingi, 2010).

Salisi yang merupakan putra raja *Ma Wa'a Dampa* merebut kekuasaan dengan melakukan cara licik bahkan berafiliasi dengan Belanda untuk mencapai kekuasaan di Bima bahkan Salisi membunuh terhadap putra mahkota keariaan yakni Sangaji Samara yang berusia 9 tahun. Salisi menjadi raja Bima tanpa persetujuan majelis adat. Salisi yang merupakan raja Bima yang terakhir berhasil digulingkan oleh *La Ka'i* yang didukung oleh seluruh rakyat dan bala tentara bantuan dari kerajaan Gowa selama tiga kali ekspedisi. Perjuangan *La Ka'i* adalah perjuangan panjang dan berdarah (Ismail, 2014).

Hubungan Bima dengan Gowa-Tallo di Sulawesi Selatan dalam periode kebebasan zaman bahari orang Makassar sekitar tahun 1567-1575 adalah salah satu tali penyambung yang memuluskan jalannya proses islamisasi di Bima. Hubungan Bima dengan kerajaan-kerajaan di Makassar dan Bugis dalam periode itu memberi kemungkinan terjalannya hubungan dengan Bima jauh sebelum pertengahan abad ke XVI itu. Akan tetapi pengaruh yang dominan terhadap tahap-tahap pengislaman Bima adalah hubungan maritime yang terjadi sejak abad ke-XVI hingga permulaan abad ke-XVII (Gani Abdullah, 2015).

Menurut Sejarahwan Bima M. Hilir Ismail, tahun 1540 M merupakan tonggak awal kedatangan Islam di tanah Bima, proses Islamisasi itu berlangsung dalam tiga tahap yaitu periode kedatangan Islam tahun 1540-1621, periode pertumbuhan Islam tahun 1621-1640 M, dan periode kerajayaan Islam 1640-1950 M. Pada awal sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan, ajaran Islam sudah masuk dan menyebar ke wilayah-wilayah pesisir pantai Bima. Proses pengislaman di tanah Bima diklasifikasikan oleh Muhammad dapat terbagi dalam empat fase. Pertama, pada abad XIV masyarakat Bima telah mengetahui tentang adanya agama Islam yang dianut oleh masyarakat pulau Jawa. Kedua, pada abad itu juga, datangnya para utusan/mubalig melalui pintu perdagangan dari Jawa, khususnya dari kesultanan Demak dan Gresik, untuk menyebarkan Islam di Bima. Ketiga, adanya beberapa orang masyarakat Bima yang memeluk agama Islam. Keempat, masuknya masyarakat Bima ke dalam Islam secara massal.

Pada tanggal 5 Juli 1640 M menjadi tonggak berdirinya kesultanan Bima dengan Sultan pertama Abdul Khair (*La Ka'i*) dan perdana menteri *La Mbila* memeluk Islam dan berganti nama menjadi Jalaludin. Bima memasuki era kesultanan yang berlandaskan Islam dalam menjalankan pemerintahannya. Sebenarnya, masyarakat Bima sudah mengenal Islam melalui penyebar agama Islam dari tanah Jawa, Melayu bahkan Gujarat dan Arab pada tahun 1609 M, yang mengenal lebih dulu adalah masyarakat pesisir. Masa kesultanan merupakan masa kejayaan Bima. Bima secara politik dan ekonomi berubah menjadi salah satu daerah perdagangan paling berpengaruh di wilayah Nusa Tenggara pada awal abad ke-16. Islam dimasa kesultanan bersinar cemerlang dan mencapai puncak kejayaan. Selama menjadi Kesultanan (Nasiwan, 2012).

Bima di pimpin oleh 15 Sultan dalam kurun waktu 322 tahun mulai tahun 1640 M sampai tahun 1951 pasca wafatnya Sultan Muhammad Salahuddin. Menurut Morris (1890), selama berlangsungnya Kesultanan Bima, ada 49 raja dan rultan yang pernah memimpin di Bima. Maharaja Sang Bima diposisikan pada urutan ke-11, sedangkan dalam catatan Rouffaer yang kemudian diterbitkan oleh Noorduyn (1987), ada 26 raja atau sultan, mulai dari Maharaja Sang Bima sampai dengan Sultan Ibrahim. Sesungguhnya sejak muncul sebagai pusat kekuasaan Islam hingga tahun 1950, Kesultanan Bima diperintah oleh empat belas sultan, mulai dari Sultan Abdul Kahir (1620-1640) sampai Sultan Muhammad Salahuddin (1915-1951) sebagai Sultan Bima yang terakhir. Dalam proses estafet kepemimpinan di Kesultanan Bima, tiap sultan memiliki strategi tersendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sultan disamping memiliki kedudukan yakni sebagai kekuasaan tertinggi dalam Kerajaan Bima, ia juga berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi majelis *Suba* dalam Kesultanan Bima.

Era kesultanan bertepatan dengan masa penjajahan di Nusantara. Hinga tidak heran berbagai kepetingan penjajah terutama bangsa Belanda juga merambah di Bima (Haris, 2004). Sultan-sultan yang

memimpin sebelum sultan Muhammad Salahuddin lebih menfokuskan pada pada persoalan masyarakat seperti memperbaiki kehidupan rakyat dalam bidang pertanian akibat kemarau, serangan bajak laut, kemiskinan, kelaparan dan juga tidak terlepas dari perang melawan kolonial Belanda. Sedangkan di era sultan Salahuddin Bima lebih diperhatikan dalam berbagai aspek kehidupan yang sangat terlihat adalah aspek agama dan pendidikan¹.

Sultan Muhammad Salahuddin sebagai sultan terakhir Kesultanan Bima memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan Islam di tanah Bima. Sultan Salahuddin merupakan salah satu pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Bima. Ia lahir di Bima pada tanggal 15 Zulhijah 1306 Hijriah atau 14 Juli 1889 dan meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 1951 merupakan putra mahkota dari Sultan Ibrahim (Ismail, 2014). Sejak usia muda ia sudah tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keagamaan, pendidikan, dan politik. Sultan Muhammad Salahuddin banyak belajar tentang ilmu pemerintahan dan agama dari ulama dan pejabat istana pada saat itu. Ia juga menekuni ilmu tauhid, serta siasat politik, ia selalu membaca buku-buku, dan rajin mempelajari ilmu Qur'an dan Hadist. Selian mendapat bimbingan dari pala ulama setempat beliau juga berguru pada ulama yang didatangkan dari Batavia yaitu H. Hasan dan Syeh Abdul Wahab dari Mekakah.

Berdasarkan faktor-faktor diatas pada tanggal 2 November 1899 beliau resmi diangkat sebagai "*Jena Teke*" oleh majelis Hadat. Kemudian untuk mendapatkan pengalaman lebih jauh dalam menjalankan roda pemerintahan, maka pada tanggal 23 Maret 1908 diangkat menjadi Jeneli Donggo atau setingkat camat dalam hirarki kepemimpinan Kesultanan Bima. Setelah sang ayah Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1915, Muhammad Salahuddin mengambil alih kekuasaan pemerintahan kemudian tahun 1917 resmi dilantik menjadi sultan Bima ke-XVI yang memerintah dari tahun 1915-1951 M. Disamping menjadi sultan, pada tahun 1949 diangkat menjadi Dewan Raja-raja se-Pulau Sumbawa atas persetujuan Sultan Dompu dan Sultan Sumbawa. Sultan Salahuddin sangat fokus pada pembangunan dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan Islam. Pada proses menjalankan tampuk kekuasaan Sultan Muhammad Salahuddin banyak mendapatkan rintangan dan tantangan.

Pada masa kekuasaannya Bima sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang cukup memprihantinkan akibat ulah dari penjajah. Namun tantangan tersebut dilalui dengan jiwa besar dan keyakinan yang teguh. Beliau melalui tantangan tersebut melalui proses yang panjang. Penulis tertarik meneliti tentang Sultan Salahuddin dikarenakan selain sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh masyarakat Bima. beliau juga merupakan satu-satunya sultan yang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap paham keagamaan, pendidikan, ekonomi dan politik bahkan Sultan Salahuddin dijuluki sebagai "*Ma ka kidi Agama*" atau tokoh yang mendirikan, memajukan dan menjalankan ajaran agama Islam ditanah Bima. Sultan Salahuddin merupakan tokoh utama yang berperan penting dalam perkembangan sejarah Bima pada awal abad ke 20.

Perjuangan beliau dalam menghadapi tantangan dari internal dan eksternal kerajaan patut diabadikan sehingga bisa menginspirasi masyarakat Bima sekarang dan yang akan datang bagi generasi-generasi penerus terutama para remaja dan pelajar. Dari sekian banyak sultan yang memimpin di Kesultanan Bima, Muhammad Salahuddin merupakan sultan yang diabadikan sebagai nama Bandar Udara di Kabupaten Bima yang bernama Bandar Udara 'Sultan Muhammad Salahuddin Bima'.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) yang dibantu dengan metode sejarah (Sjamsuddin, 2007) serta data yang di ambil menggunakan studi kepustakaan (Rahardjo, 2010). Metode penelitian sangat berhubungan dengan desain dari penelitian. Metode penelitian adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif (Prastowo, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi

Kegiatan perekonomian orang Bima pada masa kesultanan Muhammad Salahuddin berlangsung didominasi oleh kegiatan agraria. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Bima yang merupakan salah satu wilayah yang cukup subur dengan curah hujan yang cukup di daerah pulau Sumbawa. Hasil bumi yang biasanya dihasilkan oleh masyarakat Bima berupa Padi, Jagung, Kedelai, dan Bawang Merah. Hasil bumi ini tidak hanya diperdagangkan hanya di dalam daerah kesultanan saja namun juga di kirim ke luar daerah. pertanian menurut orang Bima adalah hak untuk memperoleh sawah atau areal pertanian baru, dan hak untuk memperoleh hasil-hasil pertanian.

Mengenai hak pembagian hak katas hasil-hasil pertanian seperti yang diajarkan hukumnya dalam lembaga pengajian itu perlu kirannya dipersoalkan disini karena erat kaitannya dengan hokum pertanian dan hokum Islam. Bahwa hak atas hasil pertanian menurut orang Bima adalah hak untuk memperoleh sawah atau areal pertanian baru, dan hak untuk memperoleh hasil-hasil pertanian. Mengenai hak yang pertama, tradisi Orang Bima khususnya yang tinggal di desa-desa, harus membuka hutan untuk pertanian dan mendapatkan daerah persawahan. Apabila persawahan baru telah diperolehnya, maka pada tahap pertama, petani yang bersangkutan harus menyerahkan sebagian tanah tersebut kepada Sultan. Tanah atau sawah-sawah yang diserahkan kepada Sultan itu bukanlah menjadi hak Sultan, akan tetapi dipergunakan untuk "*danamolu kai*".

Pada tahap kedua, para petani menyerahkan lagi 2.5% dari tiap hasil panen sawahnya kepada sultan melalui *Lebe na'e* atau *Cepelebe* yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyerahan 2.5% tersebut mencakup kewajiban zakat untuk tahun yang berjalan dan penyerahan hak Sultan. Menurut orang Bima, penyerahan sebagian hasil garapannya dalam membuka sawah baru itu dilakukan oleh karena dalam tindakan itu ada dua keinginan yakni untuk menunjukkan ketaatan kepada pemerintah Sultan dan bahwa tindakan itu berkaitan dengan ibadah dalam perayaan hari kelahiran nabi Muhammad. Perbuatan dan sikap yang demikian itu tidak ada sentuhan apapun dengan perbuatan hukum atas tanah dan hutang-piutang.

"*Dana molu kai*" adalah lembaga keuangan istana yang memangku tugas menyediakan sumber biaya bagi kegiatan hari-hari besar dalam lingkungan istana yang sering disebut dengan "*rawi ma tolu kali sa mba'a*" (peristiwa besar yang dirayakan tiga kali dalam satu tahun). Ketiga peristiwa yang diadakan secara besar-besaran dalam upacara resmi istana ialah (1) perayaan Siri Puan, (2) hari raya Idul Fitri dan (3) hari raya Idul Adha (hari raya Qurban). Pada upacara ketiga peristiwa besar itu dihadiri oleh seluruh pembesar istana, pembesar daerah kerajaan dan rakyat dari seluruh pelosok daerah Bima. Walaupun "*dana molu kai*" itu mengemban tugas membiayai ketiga peristiwa besar tersebut, namun "*dana molu kai*" masih menyediakan kemungkinan untuk digunakan sebagai biaya dan pengganti gaji para pemangku jabatan di istana.

Seluruh hasil panen, dipandang orang Bima atau petani desa sebagai bukan milik secara individual, akan tetapi pada hasil pertanian itu melekat hak-hak pihak lain, seperti yang tecermin dalam ungkapan

orang Bima “*ese na mangemo, woha na lampa, awa na ma rama, na siri mena ku ndi ntandi ra ntendi ede*”. Ungkapan itu bermakna bahwa segala binatang yang terbang, siapa dan apa pun yang berjalan, dan segala binatang yang meraya atau melata, masing-masing mempunyai hak atas segala macam produksi pertanian.

Atas dasar itulah maka persembahan hasil pertanian kepada sultan melalui lembaga “*nge’e ada*” adalah kesadaran atas kewajiban mereka untuk memberikan hak orang lain yang melekat pada hak individualnya. Di pihak istana, penyerahan semacam itu bukanlah tindakan seperti yang dimaksud oleh prinsip dari ungkapan tersebut di atas, akan tetapi di pandang sebagai pembayaran salah satu jenis pajak rakyat. Karena itu dapat dikatakan bahwa lembaga “*ngge’e ada*” (tinggal Budak) menurut pihak istana adalah penyerahan hasil pertanian yang dikerjakan oleh budak-budak atas tanah milik kerajaan.

Dalam pada itu prinsip menurut istana itu tidak dapat dijadikan pegangan, karena ada kecenderungan masyarakat Bima menganut prinsip bahwa tanah atau hutan beserta isinya diseluruh daerah kerajaan Bima adalah tanah milik kerajaan, dan rakyat kerajaan diperkenankan untuk membuka/mengolahnya untuk keperluan hidup mereka. Demikian pula tidak di anut system tanah “*mardika*” atau “*tanah tidak dikenal*” seperti yang dimaksud oleh lembaga Negara Hindia Belanda Nomor: 207 tahun 1913 yang menyatakan bahwa tanah rakyat dapat dirampas untuk tanah negara kemudian dikembalikan kepada rakyat untuk di olah dengan kewajiban membayar atau bagi hasil kepada pemerintah. Sistem hak atas tanah tersebut di atas mengalami perubahan akibat pergeseran sistem pemerintahan kesultanan ke sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957. Walaupun demikian komponen agama dalam sistim hukum tanah yang dilaksanakan pada masa pemerintahan kesultanan masih akrab dengan kehidupan bercocok tanam orang Bima.

Berdasarkan sumber yang didapat adapun hasil bumi yang ada di keultanan Bima pada pemerintahan Sultan Muhammad Salahaddin cukup beragam, bahkan pemerintah kesultanan mengeluarkan peraturan yang cukup ketat dalam berlangsungnya keteresedian pangan di wilayah Bima. Hal ini sesuai dengan laporan hasil pertanian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kesultanan Bima dibawah kepemimpinan Sultan Salahuddin adapun mengelurakan hasil laporan berapa jumlah hasil-hasil dari berbagai wilayah di Kesultanan Bima. Produk-produk pertanian unggulan masyarakat Bima pada saat itu diantaranya:

- a) Padi dengan luas lahan sekitar 22765,7 ha dengan jumlah tanah tegal atau sawah 12743,77 dan ladang kurang lebih 8000 ha hasil Padi di kerajaan secara keseluruhan 55.000 ton sampai 60.000 ton padi kering pertahun dan 27.500 ton sampai 30.000 ton beras setahun yaitu hasil sawah dan ladang. Wilayah yang banyak menghasilkan padi yaitu Bolo, Belo, Sape, Woha, Wawo, Rasanae, Monta dan Wera.
- b) Jagung dengan luas tanah yang digunakan di perswahan ± 4000 km dan di tengah ladang ±1000 ha wilayah yang banyak menghasilkan jagung yaitu kejenelian Rasana’e, Belo, Bolo, Monta, dan Woha. Hasil dari kerajaan secara kesuluruhan ±10.000 ton sampai 12.000 jagung biji setahun.
- c) Tembakau berbeda dengan Jagung dan Padi keberadaan lahan tembakau di wilayah Bim pada masa kesultanan kurang diminati oleh masyarakat. Di kerajaan Bima hanya sedikit saja terdapat tanaman tembakau dan tanaman pun kecil-kecil dan dipinggir-pinggir sungai pada tanah tegalan atau tanah sawah dan kebanyakan ditanah tegalan yang rata atau tanah yang miring sedikit umumnya dipilih tanah yang berpasir atau tanah gambur. Supaya gampang disiramnya dan tanahnya berpasir dan sering kebanjiran oleh karena itu ada agak gemuk. luas tanah sawah ±10 ha dan luas ditegalan pinggir kali ±70-90 ha.

- d) Kopi, penduduk di kerajaan Bima tidak menanam kopi. Dalam Kerajaan Bima terdapat kebun kopi hanya di Tambora satu onderneming dahulu kepunyaan orang Swedia yang bernama Tambora Estate. Luasnya ± 400 ha yng ditanam dengan kopi Robusta.
- e) Kelapa, kebun-kebun kelapa di kerajaan Bima hanya sedikit saja didapatnya pada kebun dekat laut, sebagian di Sape, Kempo, Labuan Bajo, Kenanga, Hu'u dan Karumbu, di bagian tengah dan di perkampungan jarang kedapatan kebun kelapa. Hasil kelapa tersebut untuk keperluan sehari-hari buat penduduk dalam kerajaan belum mencukupi oleh sebab itu tiap-tiap tahunnya banyak buah kelapa didatangkan dari pulau-pulau lain.
- f) Bawang, luas perusahaan sawah dalam tiap tahun rata-rata $\pm 300-900$ ha. Bawang banyak diproduksi dibagian Kejenelian Monta, Belo, Bolo, Woah, Dompu dan Sape sesudahnya Padi, ada pula sebagian kecil dari sawah di Kejenelian Sape dan Monta yang semata-mata dipergunakan untuk pertanian Bawang pada sawah tersebut bawang ditanam 2 kali setahun yaitu sesudah musim barat atau pada musim timur. Hasil rata-rata dalam setahun ± 900 Ton sampai 10000 Ton Bawang.
- g) Kacang Hijau, luas perusahaan di sawah ± 8000 ha. Ditegalan/Ladang ± 70000 ha. Jumlah 15000 yang terbanyak yang diusahakan yaitu dibagian Kejenelian Bolo, Dompu, Belo, Rasanae, Sape, Woah, Wera dan Monta.

Untuk menjaga keberlangsungan pertanian di wilayah Kesultanan Bima. Sultan Muhammad Salahuddin menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu. Pemerintah Kesultanan mengeluarkan Undang-Undang untuk menjaga keamanan dalam bidang pertanian yang mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 1943 yang memuat peraturan untuk mengatur keberlangsungan pertanian di wilayah Bima. Masyarakat Bima secara turun-temurun memiliki tradisi yang cukup unik dalam hal penyimpanan hasil panen setiap musim panen berlangsung.

Selain didominasi pada kegaitan pertanian masyarakat Bima juga menjalankan roda perekonomian pada sektor peternakan. Hal ini didukung oleh peraturan-peraturan kesultanan yang memerintah para Jeneli-jenelinya untuk ketersediaan hewan ternak baik untuk kebutuhan perdagangan maupun kebutuhan yang berkaitan dengan hari besar keagamaan contohnya pada saat Idul Qurban berlangsung. Pada dasarnya kegiatan pertanian dan peternakan masyarakat Bima memiliki keterkaitan yang sangat erat. Secara tegas pemerintah Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan No. 19/VIII-a tentang peternakan Kerbau, Kambing dan Kuda yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Kerbau: jumlah kerbau di wilayah Kesultanan Bima cukup banyak. Akan tetapi, dari jumlah yang sekian besarnya itu hanya sedikit saja yang terpelihara dengan baik, sebagian besar dari kerbau-kerbau disini telah dilepaskan begitu saja hingga sering kali menimbulkan gangguan terutama bagian pertanian. Untuk menjaga keadaan yang demikian, maka kami harap agar supaya diadakan aturan untuk pemeliharaan kerbau.
- b) Kuda: untuk memperbaiki peternakan kuda maka akan diadakan pemilihan kuda jantan yang memenuhi syarat-syaratnya untuk dijadikan kuda pemancet (*rahi*). Kuda ini harus didaftarkan (masing-masing Guntyo mempunyai daftar sendiri) dan diberikan cap. Kuda-kuda yang telah ditunjuk menjadi pemancet tidak diperkenankan dijual kepada orang lain, melainkan pada sesama pendudukpun hanya untuk peternakan saja.
- c) Kambing: jumlah Kambing Etawa di Bima amat kecil memenuhi semua permintaan bibit untuk memperbesar tubuhnya kambing asli disini sedang pengharapan untuk mendatangkan Etawa yang tulen mungkin belum ada. Maka perlulah mengadakan persediaan sendiri. Lebih lanjut pemerintah Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan tentang

Peraturan tentang pemeliharaan kerbau yang terdiri dari 14 pasal yang kebanyakan berisikan tentang kerbau-kerbau di wilayah Bima harus diberi cap "S" pada leher sebelah kiri agar memudahkan dalam mengenali siapa pemilik kerbau tersebut. Selain itu pada pasal 8 diterapkan sistem pajak dimana kerbau-kerbau yang telah didaftarkan dikenakan pajak sebanyak/sejumlah/0.30 (tiga puluh sen) seekor untuk satu tahun. Apabila kerbau ini disembelih dan seekor kerbau harus membayar pajak sejumlah Satu Rupiah jika kerbau ditangkap hidup sebesar Tiga Rupiah jika kerbau ditangkap mati.

Pada pasal 12 berbunyi Pasal 12: Pada waktu melepas kerbau-kerbau ditempat gembala harus ada yang menjaganya agar tidak mengganggu kegiatan pertanian. Dan pada pasal 13 ditegaskan lagi bahwa barang siapa yang melanggar aturan tersebut diatas ini maka kerbau akan *dibeslag* (rampas).

Sosial Budaya dan Keagamaan

Pergaulan kemasyarakatan Bima tidak dapat dipisahkan dengan refleksi ajaran agama Islam. Aktivitas kemasyarakatan orang Bima erat sekali kaitannya dengan sistim nilai agama, apakah suatu tindakan haram atau halal, Islam atau Kafir termasuk dalam hal berpakaian. Pakaian kalangan wanita baligh ketika berada di luar lingkungan rumah tangga berbeda dengan saat berada dalam lingkungan rumah tangga. Apabila mereka keluar rumah untuk tujuan apaun harus berpakaian "*rimpu*", atau sistem busana yang dikaitkan dengan aturan menutup aurat atau serba tertutup kecuali kedua belah mata dan dua telapak kaki. Apabila pakaian wanita "*baligh*" dalam rumah dapat menampakkan sebagai anggota auratnya seperti kepala hingga leher, dua kaki hingga pertengahan betis dapat dipandang sebagai pakaian "*kafir*".

Sebagaimana yang terjadi di daerah lain pengajaran Al-Qur'an di Bima berupaya menanamkan kemampuan membaca Al-Qur'an dimulai sejak umur lima tahun, dan pada umur sepuluh tahun sudah harus "*tama ngaji*" seperti yang telah di bahas dalam bagian terdahulu. Kemampuan membaca Al-Qur'an sering di jadikan ukuran bagi pergaulan antar pemuda. Sebaliknya dapat terjadi perbenturan dikalangan mereka hanya disebabkan oleh saling menyalahkan dalam tata cara pembacaan Al-Qur'an di tempat pengajian. Demikian pula bila terjadi suatu rencana perkawinan yang sudah sampai pada tingkat penentuan lamaran untuk di terima, maka syarat yang diajukan oleh pihak calon istri ialah antara lain kemampuan calon suami membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Tradisi itu lebih dikembangkan lagi oleh masyarakat di desa ngali kecamatan Belo bahwa sebelum aqad nikah dilakukan, calon suami diuji oleh masyarakat dan khalayak setempat dengan memberikan ujian kepada calon suami untuk menjadi imam solat magrib.

Struktur Masyarakat

Struktur masyarakat yang hendak diangkat dalam tulisan ini dititik beratkan pada pembagian masyarakat Bima yang menggambarkan adanya tingkat sosial beserta lambang-lambang statusnya. Sumber-sumber tertulis yang dapat memberikan keterangan lebih banyak mengenai masyarakat Bima sedikit sekali. Golongan Masyarakat. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin, penggolongan masyarakat Bima masih dalam keadaan seperti dalam masa sebelumnya. Menurut sumber yang ditulis Ahmad Amin, masyarakat Bima diformasikan dengan tegas pada Pemerintahan Sultan Abdul Hamid (1792-1819) dan bahkan diekspresikan dengan lambang-lambang pemerintahan pada tanggal 14 Agustus 1788. Dalam lambang itu diungkap mengenai adanya empat bangsawan, masyarakat Bima yaitu (1) golongan raja-raja, (2) golongan bangsawan, (3) golongan "dari" dan pegawai istana dan (4) golongan rakyat biasa.

Pihak pemerintah kesultanan tampaknya mengakui hanya empat masyarakat Bima. Penggolongan itu tidak memberi kesan bahwa masyarakat Bima dibagi dalam suku bangsa akibat pertalian wilayah. Demikian pula istana tidak mengakui adanya golongan budak walaupun golongan itu hidup berdampingan dengan raja-raja dan bangsawan. Penggolongan masyarakat Bima diekspresikan melalui lambing pemerintahan, yang bermakna, (1) terjemahan dari suatu tuntutan bahwa dalam fungsi pemerintahan hanya dipegang oleh golongan raja, bangsawan dan tukang atau karyawan istana, (2) merupakan suatu pengawan yang ketat terhadap distribusi tugas dan fungsi dalam pemerintahan kesultanan, dan (3) upaya untuk menutup kemungkinan bagi golongan rakyat biasa memperoleh tugas dan fungsi dalam pemerintahan.

Penggolongan masyarakat Bima itu pula mempunyai kaitan dengan pelayanan yang diinginkan oleh keluarga raja.

- a) Golongan raja-raja adalah golongan yang menduduki tingkat teratas dalam masyarakat Bima. Golongan ini menuntut secara turun-temurun sebagai golongan yang menjadi "*Londo Sang Bima*" (mempunyai garis keturunan sang Bima) Raja atau calon pengganti raja selalu dipilih dari garis keturunan laki-laki saja, karena keturunan pihak perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi raja.
- b) Anggota atau orang yang termasuk dalam golongan raja-raja ialah raja yang sedang atau orang lain yang telah pernah menjadi raja, istri atau permaisuri dan anak-anak raja, keluarga ke atas dan ke samping. Mereka itulah yang dinamakan orang Bima "*Londo Sangaji*" (keturunan raja). Seorang raja atau anak raja tidak menutup kemungkinan untuk menikah seorang wanita dari golongan rakyat biasa. Apabila terjadi demikian, golongan atau tingkat sosial istri menjadi berubah dan masuk dalam golongan raja-raja.
- c) Golongan raja-raja bertempat tinggal dalam lingkungan kesultanan. Dengan kata lain, raja beserta istrinya dan anak harus tinggal di dalam istana, sedangkan keluarga raja atau keluarga anggota raja yang lainnya tinggal di luar istana. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin (1919-1951) raja menempati dan melaksanakan tugasnya sebagai raja di dalam "*asi na'e*" (istana besar). Sedangkan keluarga raja yang lainnya tinggal di dalam "*asi mpasa*" (bekas istana), atau "*asi mantoi*" (istana yang lama).
- d) Golongan bangsawan, golongan masyarakat Bima ada di bawah tingkat raja-raja ialah bangsawan. Keturunan bangsawan memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan secara turun temurun sehingga keturunan selanjutnya dimungkinkan untuk mempunyai anggapan bahwa memegang jabatan itu adalah pengakuan hukum bagi kelanjutan kebangsawannya.
- e) Di kalangan masyarakat Bima sebenarnya belum terdapat kejelasan mengenai siapa yang mempunyai hak untuk dikatakan sebagai keturunan bangsawan atau termasuk "*Londo ruma*" atau "*Londo sangaji*" (keturunan raja-raja) Dilihat dari fungsinya dalam pemerintahan, sebagian besar masyarakat Bima berpendapat bahwa orang yang termasuk golongan bangsawan itu ialah mereka yang menduduki jabatan *Tureli, Jeneli, dan Bumi* dalam lingkungan *Bumi na'e*. Akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa golongan bangsawan adalah pemangku jabatan rendah atau bekerja di dalam lingkungan Istana. Keadaan itu bagaimanapun menunjukkan tidak adanya batasan-batasan tertentu untuk mengidentifikasi secara terperinci orang-orang yang termasuk dalam golongan bangsawan.
- f) Golongan bangsawan pada mulanya bermukim di lingkungan Istana. Sebagian besar golongan ini tinggal di daerah tertentu yang disebut "*kampo na'e*" (kampung besar), suatu lokasi pemukiman khusus bagi pembesar atau pejabat pemerintahan seperti para *Tureli, Jeneli, dan Bumi-Bumi*.

Sebagaimana golongan raja-raja, golongan bangsawan juga menuntut bahwa hanya mereka secara turun-temurun yang dapat memangku jabatan-jabatan Tureli, Jeneli, dan para Bumi. Keadaan itu masih dijumpai takkalah masih terjadi pergeseran system pemerintahan berdasarkan sistem Undang-Undang No. 1 tahun 1957 itu membuka kesempatan terjadinya persaingan antara golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa untuk merebut jabatan dalam pemerintahan. Gejala itu makin tampak apabila kalangan rakyat biasa berhasil meraih jabatan tersebut.

- g) Golongan “dari” dan pegawai Istana. Golongan “dari” pada mulanya adalah kelompok masyarakat dari golongan rakyat biasa yang diangkat untuk bekerja sesuai dengan perintah istana dalam kadar keahliannya didalam lingkungan istana. Mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat tersendiri karena golongan ini terdiri dari pegawai rendahan, pesuru, atau tukang untuk melaksana pekerjaan tertentu diluar atau didalam lingkungan istana.
- h) Menurut Wahab, golongan ini berdasarkan daerah asalnya dibagi dalam sebelas “dari”, dan ia juga membagi “dari” Suba, yakni kelompok masyarakat tertentu dan pada umumnya akan menjadi anggota angkatan bersenjata, dan (2) “dari” Ngaji yakni kelompok masyarakat tertentu, dan pada umumnya yang akan memangku jabatan dalam urusan agama Islam.
- i) Catatan Wahab tersebut berbeda dengan tulisan Ahmad Amin yang menggambarkan pembagian “dari” menurut tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam Istana. Karena itu cenderung diakui bahwa seluruh pegawai istana dibawah koordinasi Bumi Parenta dan Bumi Renda termasuk golongan tersebut. Tugas dan tanggung jawab mereka dalam koordinasi Bumi Parenta meliputi pengawasan di dalam dan di luar istana, Pekerjaan sebagai pesuruh, urusan kesenian istana dan perlengkapannya, urusan produksi perlengkapan istana.
- j) Golongan rakyat biasa adalah masyarakat yang tidak termasuk didalam salah satu dari golongan raja-raja bangsawan; atau golongan “dari”/pegawai istana. Penggolongan masyarakat Bima yang demikian cenderung menempatkan rakyat biasa sebagai golongan terendah. Golongan rakyat biasa pada umumnya melakukan kegiatan sehari-hari sebagai petani, pedagang bahkan sebagai pesuruh kaum raja atau bangsawan, sebagai nelayan dan berburu. Dalam kegiatan sehari-hari rakyat biasa juga menduduki fungsi-fungsi keagamaan sebagai guru ngaji, atau murid.

Fungsi-fungsi keagamaan itu melahirkan juga tingkat sosial dibandingkan dengan fungsi-fungsi keagamaan tadi. Dalam kesempatan kenduri atau bersholat Jum’at atau sholat lima waktu dalam langgar dan mushollah, guru ngaji atau guru haji selalu ditempatkan oleh anggota masyarakat lainnya pada posisi terdepan atau pada shaf (deretan) pertama.

Pantangan -pantangan hidup bagi golongan rakyat biasa juga erat sekali kaitannya dengan tradisi istana dan dekat dengan ajaran agamanya, terutama dalam hal permulaan tanam, pada masa dan sesudah panen; tidak ada pantangan bagi rakyat biasa untuk pada suatu ketika akan menikah dengan golongan raja atau bangsawan bahkan akan tampak adanya saling ketergantungan antara kalangan istana dengan rakyat biasa seperti dicerminkan oleh “*dana molukai*” dan “*ngge’e adat*” kedua tradisi itu merupakan jembatan yang menghubungkan kalangan istana dengan rakyat biasa.

Lambang Status

Pembagian masyarakat Bima seperti yang disebutkan diatas merembek pula pada hak pemakaian gelar yang melambangkan status golongan masyarakat. Sejak akhir tahun 1967, gelar tidak lagi melambangkan perbedaan status sosial akan tetapi telah berubah sehingga menjadi penyandangan yang tidak mempunyai pengaruh apapun. Sumber-sumber atau keterangan tertulis mengenai lambang status

dalam masyarakat Bima hamper tidak ada, dan hamper tidak pernah diadakan penelitian secara khusus mengenai status sosial dalam masyarakat Bima.

a. Gelar yang di peroleh akibat garis keturunan.

Golongan Raja -raja menyandang gelar "*Ruma*" karena mereka adalah "*Londo Sangaji*" (keturunan raja) atau "*londo ruma*" (keturunan Sengaji)". Gelar "*Ruma*" selalu diikuti oleh nama atau panggilan diri, seperti "*Ruma sangaji*" bagi seorang raja. Dalam golongan raja -raja istilah Sultan saja dipandang sebagai gelar dalam jabatan raja, pertanda kerajaan Islam. Apabila ia tidak menjadi lagi, maka gelar sultan tidak sandal lagi, kecuali hanya gelar "*ruma*". *Ruma Mone*" adalah gelar anak laki -laki raja, "*ruma siwe*" bagi anak wanita raja.

Kadang-kadang gelar "*ruma saleha*", "*ruma mori*" dan demikian seterusnya untuk golongan raja. Masih ada gelar yang mengungkapkan golongan raja -raja itu dekat dengan golongan biasa, seperti gelar "*ina ka'u*" (ibu yang mulia), dan "*ama ka'u*" (bapak yang mulia) "*ina*" atau "*ama*" biasanya dipakai untuk panggilan seorang dalam golongan rakyat biasa kepada ibu atau bapaknya.. Jika anak raja itu bernama Mariam, maka lambang status keakrabannya adalah "*ina ka'u mari*" dan Abdul kahir menjadi "*ama ka'u kahi*" dan kadang-kadang juga anak raja ini dipanggil dengan "*ruma ka'u mari*" atau "*ruma ka'u kahi*".

Walau demikian masih dijumpai kesimpangansuran pemakaian gelar itu yang muncul dalam golongan bangsawan dan ada yang menganggap dirinya termasuk golongan raja seperti yang telah diuraikan sebelum ini. Karena itu, merekapun menuntut gelar "*ruma*" sebagai lambang statusnya. Mungkin alasan mereka itu didasarkan kepada adanya garis keturunan dengan raja-raja.

b. Gelar yang diperoleh setelah memangku jabatan tertentu.

Gelar dapat diperoleh melalui proses pemangku suatu jabatan didalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bima dan terjadi di dalam golongan bangsawan atau golongan "dari"/pegawai istana. Gelar-gelar itu diberikan oleh pemerintah kesultanan secara resmi. Menurut keterangan A.D. Talu, yang pernah memangku jabatan tingkat ini pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin, golongan Bangsawan yang memangku jabatan dalam jenjang tingkat Tureli Nggampo (jabatan Kepala Pemerintahan Kesultanan), Para Tureli, para Jeneli, dan para pemangku jabatan Bumi Na'e mendapat gelar "*Rato*". Gelar "*Rato*" itu biasanya disebut sebelum nama jabatannya, seperti Tureli Bolo, dipanggil dengan "*Rato Bolo*"², Tureli Parado dipanggil dengan "*Rato Parado*".

Ada golongan-golongan bangsawqan tertentu yang boleh memakai, gelar "*Rato*" sementara anggota yang lainnya dijumpai juga memakai gelar lain seperti "*Dae*", "*Muma*", "*Teta*". Gejala itu, bagaimanapun juga, membuka tabir kemujudan mereka mengenai tata aturan pemakaian gelar.

Jika dikatakan bahwa gelar "*daeng*" itu adalah akibat adanya sentuhan garis keturunan dengan Sultan hasanuddin di Makassar, maka pemakaian gelar "*daeng*" itu adalah kurang tepat, karena Sultan hasanuddin bergelar "*karaeng*". Jabatan dalam lingkungan Badan Hukum Syara'sejalan dengan Tureli Nggampo. Hingga Bumi Na'e jabatan imam, khatib, *lebe na'e* dan *cepe lebe* (lebai pengganti) dalam badan Hukum Syara dan dipandang sejajuar dengan jabatan Tureli Nggampo hingga Bumi Na'e.

c. Gelar yang memberi peluang untuk pemangku jabatan tertentu.

Kelangsungan dalam memegang suatu jabatan dalam lingkungan pemerintahan kesultanan adalah persoalan yang selalu melekat kepada golongan Raja, Bangsawan dan bahkan pada golongan "dari". Oleh karena itu, gelar-gelar seperti yang diuraikan dalam bagian yang sebelumnya turut mengungkap hal-hal yang melekat dengan persoalan di atas. Penyandang gelar "ruma" mempunyai peluang yang terbuka untuk dipilih menjadi Raja. Golongan raja-raja sebagai "Londo sangaji" atau "londo Ruma" adalah pemegang hak untuk jabatan atau Raja atau Sultan.

Gelar "Rato" adalah satu-satunya gelar menjadi peluang dan cukup Dominan bagi golongan bangsawan untuk menduduki jabatan dalam jajaran Bumi Na'e hingga Tureli Nggampo. Gelar "Teta", "Muma", dan "Uba" dapat membatasi penyandang gelar itu untuk memangku jabatan lebih tinggi yang biasanya diperoleh golongan bangsawan. Karena itu, golongan "dari" dan para pegawai istana lebih condong mempertahankan posisi mereka menjadi pegawai, tukang dan pesuruh dalam istana dari pada menuntut status yang lebih tinggi atau keluar dari golongan.

d. Gelar-gelar yang terdapat dalam lingkungan rakyat biasa.

Kehidupan ekonomi rakyat biasa tidak menempatkan mereka pada tingkat social yang berbeda. Kehidupan keagamaan justru memberi pengaruh bagi hubungan timbal-balik di antara mereka sehingga menyebabkan adanya tingkat social yang berbeda. Seorang anggota masyarakat dalam golongan rakyat biasa akan memperoleh kedudukan lebih tinggi dari yang lainnya apabila telah berhasil mencapai tingkat "tuan guru imam", "tuan guru", "guru imam", "guru lebe", atau "guru hati. Gelar-gelar itu dapat berupa anugerah sebagai pemangku jabatan dalam badan hukum Syara'dan juga pemberi masyarakat.

Menyandang gelar itu bukanlah karena termasuk dalam "dari" ngaji saja, akan tetapi menurut penilaian masyarakat dalam memangku dan melaksanakan jabatannya serta keahlian dalam agama dan hukum Islam patut menyandang gelar tadi. Karena itu, siapa pun, walaupun ia bukan termasuk golongan "dari" ngaji, mempunyai peluang terbuka untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut di atas.

Selain gelar-gelar yang disebutkan di atas, masih ada gelar-gelar yang lain seperti. "ruma guru", "ruma haji", dan "guru", gelar itu juga bukan akibat keturunan akan tetapi juga sebagaimana gelar sebelumnya diperoleh melalui pemberian masyarakat. "ruma guru" adalah gelar seorang guru yang mengajar agama Islam dalam lingkungan Istana.

Biasanya gelar itu disandang oleh orang Bima keturunan melayu. Namun yang lebih dikenal dalam masyarakat Bima bukanlah "ruma guru" dari kalangan orang melayu akan tetapi justru dari kalangan orang Bima asli seperti Ruma guru Haji Muhammad said, Ruma guru Haji Abdul Gani. Gelar "guru" diberikan masyarakat kepada orang yang melaksanakan tugas mengajar disekolah, dan juga kepada mereka yang mengajarkan tata cara memukul rebana, atau mengajar mengaji. Gelar "guru" itu akan melekat terus di depan nama diri sang guru hingga sekarang ini, seperti "guru bo", "guru lama".

Guru Hima gelar "tuan guru ngaji" adalah gelar seorang "ruma haji" yang mengajak agama Islam dari rumah ke rumah di daerah pedesaan. Biasanya gelar itu dipakai sebelum nama diri seperti Tuan Guru Haji Abbas, Tuan Guru Haji Malik, Tuan Guru Haji Abu Bakar, Tuan Guru Haji Abdul Mahali, dan lain-lainnya. Gelar "ruma haji" adalah gelar yang diperoleh seseorang setelah menunaikan ibadah haji sebelum tahun 1951 yakni sebelum meninggal Sultan Muhammad Salahuddin Sultan Bima yang terakhir.

Pada waktu pemerintah Sultan Muhammad Salahuddin terdapat suatu ketentuan tidak tertulis bahwa tiap orang Bima yang berangkat ke Mekkah baik untuk menunaikan Ibadah Haji atau untuk bermukim, diharuskan bersalaman dengan "ruma sangaji" dan demikian pula setelah kembali dari Mekkah sebelum ke desa masing-masing. Acara bersalaman itu dimanfaatkan raja untuk memperoleh

berita atau keterangan mengenai kemungkinan adanya ilmu baru atau kitab-kitab yang dibawa para Haji dari Mekkah.

Variasi warna Jubah.

Bagi golongan rakyat biasa, jubah bukan merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan gelar. Jubah itu secara populer dipakai oleh yang sudah melaksanakan ibadah Haji. Akan tetapi dikalangan masyarakat terbatas seperti di Desa Ngali masih hidup gejala pemakaian jubah yang berwarna merah tua, Hijau dan Putih dengan maksud tertentu. Menurut keterangan yang di peroleh dari masyarakat setempat, jubah merah tua melambangkan pemakainya sudah berada pada tingkatan tuan guru haji, yang biasanya diukur dengan pengalaman mengajar serta keahliannya dalam membaca kitab-kitab figh, menguasai agama dan hukum Islam, serta mengajar di kalangan rakyat.

Di desa Ngali jubah merah itu dipakai oleh Tuan Guru Haji Abbas, Tuan Guru Haji Muhammad, Tuan Guru Haji Idris, Tuan Guru Haji Muhammad said, Tuan Guru Haji Yasin. Jubah hijau biasanya dipakai oleh para haji yang berada di bawah tingkat jubah merah tua. Mereka ini pada umumnya akan menggantikan pemakai jubah merah dalam berbagai peranannya. Jubah putih biasa dipakai oleh yang baru kembali menunaikan ibadah haji atau haji yang akan menggantikan peranan jubah hijau. Penggantian peranan jubah merah tua, walau jubah putih memiliki pengetahuan agama dan hukum Islam yang tidak ditempat melalui pendidikan khusus.

Pada sekitar tahun 1929 pemerintah Kesultanan Bima mengeluarkan peraturan tentang bagaimana orang-orang Bima keluar dari Bima ke Mekkah. Peraturan ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang diwajibkan ketika orang ingi melaksanakan ibadah haji, beberapa poin peraturannya adalah:

- a. Orang-orang yang akan ke Mekkah ditentukan menyediakan uang perbekalan sekurang-kurangnya 250 Ringgit (enam ratus duapuluh lima rupiah).
- b. Pada uang ini sudah terhitung pembayaran tiket kapal pulang pergi, yang akan dibayarkan kepada kantior KPM.
- c. Khusus untuk anak-anak hanya membayar setengah harga dan pembayaran tiketpun hanya dikenakan biaya setengah saja
- d. Uang perbekalan orang yang ingin berangkat haji diwajibkan untuk melapor ke hadapan Jeneli untuk disaksikan, kemudian tugas Jeneli yakni mencatat tahun terima dan lain sebagainya.
- e. Zelfbestuur menerima satu opgave dari tiap-tiap Jeneli, dimana diterangkan banyak dan halnya masing-masing yang akan ke Mekkah, kemudian dibuatkan keterangan yang akan diberikan kepada seorang pengurus yang telah dipilih oleh Zelfbestuur. .
- f. Pengurus inilah yang akan mengambil tas dan tiket bagi calon Jemaah haji,

Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, ketentuan tersebut harus dipenuhi seutuhnya. Jika tidak maka orang-orang tersebut dilarang untuk pergi Haji karena belum memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Sultan.

Pendidikan

Kehidupan orang Bima dan kelembagaan pendidikannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pengislaman. Sejak tahap-tahap permulaan pengislaman Bima hingga keabad ke-19. Pendidikan non-formal adalah satu-satunya bentuk kelembagaan pendidikan orang Bima. Pengajaran agama dilakukan dilingkungan rumah tangga, masjid, langgar surau atau mushollah. Penanggungjawab lembaga pendidikan itu dan pengajarannya adalah para muballik atau penyebar Islam. Bentuk-bentuk kelembagan itu dilanjutkan oleh para penyebar Islam berikutnya seperti Datuk Raja Lelo (cucu Datuk Ri Bandang)

bersama ayahnya Datuk Sri Nara Biraja, Datuk Iskandar, Datuk Selangan Koto, Datuk Panjang. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Umar Al Bantan, seorang keturunan Arab dari Banten serta H.M Sidiq, H. Abdul Rasyid, H. Abdullah, H. Abdul Gani, H. Idris, H. Hasan Betawi dan Syekh Abdul Wahab As-Syafi'i dari Masjidil Haram.

Pendidikan dan perjuangan pengajaran yang diberikan dalam masjid atau Langgar, di istana pada tiap malam Jum'at khusus bagi keluarga istana, dakwah di desa-desa, telah memberikan bentuk-bentuk dasar bagi lahirnya sistem pendidikan formal di Bima. Sebelum masa kemerdekaan, lembaga pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah penjajahan dan lembaga keagamaan Islam. Pada tahun 1918 didirikan *Vervolg School* oleh pemerintah kolonial Belanda yang selanjutnya di tingkatkan menjadi *Normal Cursus* yang pada akhirnya di ubah menjadi *Cursus Volks Onderwijzer* (CVO) pada tahun 1937. CVO itu diubah pula sehingga menjadi *Ovleiding Volks Onderwijzer* (OVO) ada tahun 1948. Sebagai lanjutan dari OVO didirikan *Hollandas Inlandsche School* (HIS).

Pada tahun 1949 Lembaga pendidikan tersebut hanya menampung murid-murid dalam jumlah terbatas dan hanya dapat disentuh orang Bima dari kalangan tertentu. Sistem pendidikan tradisional yang berpusat di masjid dan langgar yang berazaskan Islam tetap dipertahankan, tetapi sistem pendidikan modern melalui lembaga pendidikan (sekolah) harus segera dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian system budaya (adat istiadat) yang Islami, sebagai jati diri masyarakat Bima yang dikagumi oleh semua pihak sepanjang sejarah.

Pada tahun 1921, Sultan Muhammad Salahuddin mulai mencanangkan sistem pendidikan modern dengan mendirikan HIS di kota Raba. Pada tahun 1922, mendirikan "Sekolah Kejuruan Wanita" (*Kopschool*) di Raba. Untuk memimpin sekolah itu, Sultan Salahuddin mendatangkan seorang guru keturunan Indonesia yang berjiwa nasionalis Sulawesi Selatan bernama SBS Yulianche. Guna pemerataan pendidikan, pada tahun 1922 Sultan Muhammad Salahuddin mendirikan sekolah agama dan umum di seluruh kejenelian (Kecamatan). Mulai saat itu di desa-desa tertentu didirikan sekolah agama setingkat Ibtidaiyah yang bernama "Sekolah Kita" (Sekolah Kitab) dan sekolah umum yang bernama "Sekolah Desa" yang kemudian berkembang menjadi "Sekolah Rakyat" yang setingkat dengan Sekolah dasar (SD) pada masa sekarang.

Pada tahun 1931, Ruma Bicara (Perdana Menteri) Abdul Hamid bersama Abdul Wahid Karim tokoh muda Muhammadiyah kelahiran Sumatra barat, mendirikan "Madrasyah Darul Tarbiyah" di kota Raba. Keberadaan sekolah ini disambut positif oleh Sultan Muhammad Salahuddin dengan memberi bantuan berupa dana serta sarana pendidikan. Pada tahun 1934, Sultan bersama Ulama dari Batavia bernama Syekh Husain Saychab Mendirikan "Madrrasah Darul Ulum" di kampung Suntu Bima. Dua lembaga pendidikan Islam ini, berhasil mencetak kader Islam yang kelak menjadi tokoh-tokoh yang berani baik pada masa pergerakan maupun pada era revolusi kemerdekaan.

Pada tahun 1931, pengembangan kualitas dan kuatintitas sekolah agama serta rumah ibadah (Masjid dan Langgar) oleh Sultan diserahkan kepada "Lembaga Syara Hukum". Lembaga yang sebelum tahun 1908 merupakan lembaga resmi pemerintah kesultanan yang bernama "Lembaga Syarah Hukum". Pada tanggal 16 Maret 1968 lembaga ini berubah statusnya menjadi "Yayasan Islam Bima". Sumber Dana Berasal dari "*Dana Molu*" (Sawah Maulud) sebanyak 200 Ha.

Pada awal pelaksanaan sistem pendidikan modern, Sultan Muhammad Salahuddin mengalami banyak kendala. Masyarakat yang terkenal taat pada agama, curiga dengan sistem pendidikan yang berasal dari orang Belanda yang dianggap "*Dou Kaff*" (Orang Kafir). Untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat, Sultan Muhammad Salahuddin berusaha mendatangkan guru-guru yang beragama Islam dan berjiwa nasionalis dari berbagai daerah diluar Bima, antara lain dari Makassar dan Jawa. Guru-guru non

muslim tetap berjiwa nasionalisme diusahakan untuk mengajar di sekolah-sekolah umum. Akhirnya kehadiran guru-guru tersebut disambut baik oleh masyarakat. Semangat persatuan yang tidak dibatasi oleh suku dan agama mulai terjalin. Hal ini merupakan pertanda Tumbuhnya semangat kebangsaan di Bima. Guru-guru yang didatangkan dari luar daerah, antara lain Muhammad Said akhirnya menikah dengan gadis Ngali Bima dan memperoleh anak antara lain Prof. Dr. Muh.Natsir Said.

Salah satu kebijakan sultan Muhammad Salahuddin yang patut kita hargai ialah memberikan Beasiswa kepada pelajar yang berprestasi untuk belajar di Makassar dan kota-kota besar di Jawa, bahkan ada yang dikirim ke Timur Tengah Pelajar yang diberi beasiswa benar-benar berdasarkan prestasi dengan tidak mempertimbangkan status sosial dan jenis kelamin. Setelah kembali di Bima mereka tampil sebagai pemimpin dan tokoh perjuangan pada masa revolusi kemerdekaan.

Sekolah atau lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga keagamaan Islam dalam kategori pendidikan formal mulai didirikan di Bima pada tahun 1931, yakni pada saat didirikan Darul Tarbiyah. Darul Tarbiyah itu dimaksudkan sebagai protes terhadap diskriminasi murid pada sekolah Belanda, dan sebagai lanjutan lembaga pendidikan non formal yang telah berkembang di Bima sejak awal penyebaran Islam.

Pada tahun 1935 didirikan madrasah PIB, dan Madrasah Muhammadiyah didirikan pula pada tahun 1938. Setelah Indonesia merdeka, seluruh lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan Islam diperintahkan oleh Sultan Bima untuk diserahkan kepada badan Hukum Syara Bima. Atas dasar itu Badan Hukum Syara' mengembangkan lembaga pendidikan Agama Islam itu tidak hanya di kota, akan tetapi di setiap desa. Pada setiap desa didirikan Madrasah Darul Ulum dengan mata pelajaran yang tidak berbeda dengan lembaga pendidikan Islam sebelum kemerdekaan. Para pengajar di Lembaga pendidikan itu terdiri dari para Tuan Guru yang pernah bermukim bertahun-tahun di Mekkah dan juga orang-orang Bima lulus Darul Tarbiyah. Para mukimin di mekkah itu di pulangkan ke Bima atas perintah dan biaya Sultan Bima.

Selain Darul Ulum, juga terdapat Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, pendidikan Guru yang diselenggarakan oleh Badan Hukum Syara, Murid Sekolah Umum Seperti SD, SMP, dan SMA yang didirikan pada sekitar tahun 1950-an, masih diharuskan oleh orang tua mereka untuk belajar agama Islam pada madrasah-madrasah tadi. Selain pendidikan formal, masih terdapat lembaga pendidikan non-formal yang ikut memberi warna agama Islam dalam kehidupan orang Bima. Lembaga pendidikan non-formal itu mengajarkan agama Islam yang diselenggarakan pada tiap rumah tangga terdapat lembaga "*ngaji karo'a*" (mengaji Al- Qur'an) yang mendidik anak umur sekolah mengaji Al-Qur'an yang diajarkan oleh "guru ngaji" secara sukarela. Murid yang mengikuti "*ngaji karo'a*" adalah anak-anak yang berumur antara 5-6 tahun, dan selama tiga tahun anak tersebut harus menyelesaikan pembacaan Al-Qur'an 30 juz. Puncak pendidikan agama pada lembaga "*ngaji karo'a*" itu ialah "*khara karo'a*" (khataman Al-Qur'an atau tamat mengaji) yang dibarengi dengan acara khitanan bagi anak yang bersangkutan.

Selain lembaga pendidikan "*ngaji karo'a*" dalam lingkungan rumah tangga, terdapat pula lembaga pengajian Al-Qur'an dari rumah ke rumah, masjid dan langgar. Pengajian itu hanya menitik beratkan pelajarannya pada hukum Islam dan tasawuf. Pendidikan yang terakhir inilah yang mengajarkan secara langsung sistem Zakat dalam Islam, sistem pembagian hak atas hasil-hasil pertanian sepanjang kaitannya dengan kegiatan ibadah dan upacara agama.

SIMPULAN

Bima sebagai sebuah kerajaan memiliki peranan penting dalam panggung sejarah di wilayah Indonesia bagian timur khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Tampilnya Bima sebagai wilayah kesatuan

pemerintahan yang berlandaskan Islam tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang dan berliku. Bima yang salah satu pusat perdagangan bebas sekaligus penyambung antara wilayah Indonesia bagian tengah ke Indonesia bagian timur menghadapi banyak rintangan baik yang datang dari internal dan eksternal kerajaan. Kemelut politik di kerjaan Bima memberikan peluang berdirinya kesultanan Bima, 5 Juli 1640 menjadi momentum penting perjalanan daerah bima yang menandai perubahan dalam system pemerintahan, politik, dan agama bagi masyarakat Bima hingga berakhirnya kesultanan pada tahun 1951 pasca wafatnya sultan Muhammad Salahudin. Lebih dari tiga abad kesultanan Bima memainkan peranan penting dalam peraturan sejarah dan budaya nusantara, bahkan dunia. Silih berganti para sultan, Rumah bicara, dan para ulama bahu membahu dengan rakyat membangun sendi-sendi kehidupan yang kental dengan nuansa islam. Lebih dari tiga abad pula mereka berjuang dengan cucuran darah dan derai air mata melawan para penjajah. Patah tumbuh hilang berganti, konsistensi perjuangan tetap ditunjukkan demi persada pertiwi dan rakyat. Kecemerlangan itu berakhir di masa api proklamasi terus membahana di Persada ibu pertiwi. Keberadaan Bima di dalam mata rantai pelayaran dan perdagangan di Nusantara tidak terlepas dari letak kepulauan Sunda Kecil secara keseluruhan. Kepulauan ini dengan persediaan air minum yang baik kualitasnya dan makanan yang dimilikinya dapat melayani pedagang-pedagang Melayu dan Jawa dan sekaligus tempat beristirahat dalam jalur pelayaran dari barat ke timur. Di sini mereka menukarkan pakaian yang mereka bawa dari Malaka dan Jawa dengan rempah-rempah. Sedangkan Bima memasok kayu celup (dye-wood) untuk pedagang Malaka yang kemudian di ekspor ke Cina. Boleh jadi karena pentingnya Bima, nama Bima lebih sering digunakan oleh orang Portugis dan Belanda untuk menyebut keseluruhan pulau Sumbawa.

Pada hal di Sumbawa terdapat kerajaan lain yakni Dompu, Sanggar, Tambora, Pekat dan Sumbawa. Ditinjau dari perkembangannya, kerajaan Bima tentu saja harus diletakkan di dalam kerangka hbungannya dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumbawa dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, khususnya Gowa di Sulawesi Selatan. Di samping itu menarik juga untuk menggambarkan interaksi kerajaan Bima dengan orang Eropa yang dalam perkembangannya kemudian masuknya wilayah Bima ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Salahuddin, Kesultanan Bima banyak menghadapi berbagai perlawanan terhadap penjajah yakni Belanda dan Jepang. Kehidupan masyarakat Bima banyak dipengaruhi oleh Islam sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah kesultanan. Hal ini tercermin dari implementasi kehidupan sehari-hari masyarakat Bima masa Sultan Salahuddin lebih mengedepankan nuansa Islami. Kehidupan politik pemerintahan yang banyak dipengaruhi oleh masuknya Belanda dan Jepang, tidak membuat Bima kehilangan marwah sebagai sebuah wilayah yang berkuasa secara independen. Kesultanan Bima harus bergabung dengan NKRI. Empat belas sultan mewakili empat belas generasi telah menorehkan sejarah panjang dan tatanan nilai serta memberi arti bagi jalan panjang sejarah tanah Bima. Kesultanan Bima dilahirkan oleh sejarah dan diakhiri juga oleh sejarah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gani Abdullah, A. (2005). *Badan Hukum Syara Kesultanan Bima*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
Gani Abdullah, A. (2015). *Bima Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Bima Genta Publishing.
Haris, T. (2004). *Kerajaan Tradisional di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
Ismail, M. H. (2014). *Raja dan Sultan Bima*. Bima: Pemerintah Kabupaten Bima.
Malingi, A. (2010). *Kiprah Raja-Raja Bima*. Bima: Pemerintah Kabupaten Bima.
Nasiwan, C. dan. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.

- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Rahman Hamid, A. (2014). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.